

LKIP TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia- Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2024 atau periode transisi pemilihan kepada daerah serentak dari tahun perencanaan 2024-2026 Kota Bekasi dan Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2024-2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi untuk pencapaian yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kota Bekasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

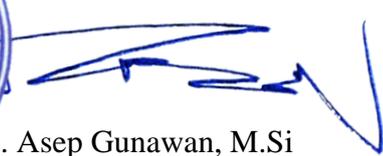
Dokumen LKIP juga Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Bapenda selama Tahun Anggaran 2024 yang disusun secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan kepala Bapenda Kota Bekasi kepada semua pihak yang berkepentingan dan juga laporan ini dimaksudkan untuk sebagai sarana mengevaluasi terhadap capaian kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun LKIP ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan peningkatan kinerja serta perbaikan bagi penyusunan LKIP Bapenda Kota pada tahun berikutnya.

Bekasi, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah




Drs. Asep Gunawan, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	7
1.3	Sumber Daya	12
1.4	Aspek Strategis Organisasi	15
1.5	Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	17
1.6	Sistematika Penyajian	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 24

2.1	Rencana Strategis 2018 – 2023	24
2.1.1	Tujuan dan Sasaran Bapenda Kota Bekasi	26
2.1.2	Indikator Kinerja Utama	27
2.2	Perjanjian Kinerja	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47

3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	49
3.1.1.	Capaian Sasaran Strategis	49
3.1.2.	Capaian Indikator Program	50
3.1.3.	Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan	51
3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu	54
3.2.1.	Perbandingan Sasaran Strategis Dengan Tahun Lalu	54
3.2.2.	Perbandingan Indikator Program	57
3.2.3.	Perbandingan Program dan Kegiatan	59
3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	61
3.3.1.	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis dengan Renstra	61
3.3.2.	Perbandingan Kinerja Indikator Program dengan Renstra	66
3.4.	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara, Pemerintahan Kabupaten/Kota Sekitar dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	69
3.4.1.	Perbandingan dengan Realisasi Penerimaan Negara	69
3.4.2.	Perbandingan dengan Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Sekitar	69
3.5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan	

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	62
3.5.1. Analisis Capaian Sasaran Strategis	70
3.5.1.1. Capaian Sasaran Strategis Pertama	70
a. Analisis Pendapatan Asli Daerah	72
b. Analisis Pajak Daerah	72
c. Analisis Retribusi Daerah	74
d. Analisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	74
e. Analisis Lain_lain PAD Yang Sah	75
f. Arahan Pimpinan	76
g. Permasalahan dan Rekomendasi	77
3.5.1.2 Capaian Sasaran Strategis Kedua	79
a. Arahan Pimpinan	80
b. Permasalahan dan Rekomendasi	81
3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	82
3.6.1. Sumber Daya Manusia	82
3.6.2. Analisis Sarpras	84
3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	84
3.7.1. Analisis Dukungan Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Pertama	85
3.7.2. Analisis Dukungan Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Kedua	92
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Rekomendasi	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Serangkaian peraturan yang mendasari penyusunan SAKIP yakni Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan DPRD. Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Adapun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya serta menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Bab 1 Pasal (1) tentang Ketentuan Umum Nomor 11 yakni Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja (LKIP)

berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Gambar 1.1



Hubungan Dokumen Perencanaan Dengan LKIP

Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kota Bekasi berperan sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan dengan bidang urusannya adalah Keuangan Daerah khususnya tentang uang yang didapat yakni Pendapatan Daerah. Untuk itu dalam dokumen perencanaan dimasa transisi Pilkada Serempak telah tersusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi dengan tujuannya yakni **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan”** dengan sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”** dan arah kebijakannya adalah **“Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Berbasis Digital”**. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi 2024 – 2026.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Nomor 530/I/Bapenda.SET tentang Pembentukan TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2025. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Bapenda Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Bapenda Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kota Bekasi;
2. Menjadikan Bapenda Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bapenda Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan Masyarakat kepada Bapenda Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan urusan keuangan daerah.

Penyusunan LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU Bapenda Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2024 yakni :

1. Persentase Peningkatan PAD **dengan target sebesar 0,01%** memperoleh capaian sebesar **-1.77% dari capaian PAD tahun 2023 sehingga capaian target tahun 2024 sebesar 177%**.
2. **Meningkatnya Nilai AKIP dengan target nilai 79** memperoleh capaian kinerja sebesar **78.07 sehingga nilai capaian tahun 2024 sebesar 98.82%**.

Berdasarkan penjelasan di atas kinerja pada Tahun 2024 Bapenda Kota Bekasi tidak mencapai target hal ini dikarenakan pencapaian kinerja pada tahun 2024 untuk PAD mengalami kenaikan target yang sangat signifikan dan berimbas pada penilaian AKIP pada Bapenda Kota Bekasi meskipun tidak mencapai target tidak sepenuhnya akibat dari kinerja Bapenda Kota Bekasi seluruhnya. Adapun Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

Untuk indikator capaian persentase peningkatan penerimaan PAD memperoleh capaian kinerja sebesar **-177%** persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar **-1.77%**, capaian ini adalah hasil dari perhitungan dengan target yang telah ditetapkan Tahun 2024 adalah sebesar **0,01%**. Tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk indikator Persentase Peningkatan PAD adalah memastikan bahwa di Tahun 2024 Peningkatan PAD dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini perlu perbaikan mulai dari penetapan target perencanaannya dan kinerja cara mencapainya lebih terarah.

Untuk indikator Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi memperoleh capaian kinerja sebesar **78.07** capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi mencapai penilaian dengan predikat **BB** capaian ini adalah hasil dari perhitungan dengan target yang telah ditetapkan yakni nilai dengan predikat **BB** dengan nilai sebesar **79**. Tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk indikator Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi adalah memastikan bahwa di Tahun 2024 nilai AKIP di Bapenda Kota Bekasi dapat ditingkatkan nilainya menjadi nilai lebih baik lagi.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada **BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)** pada Laporan Kinerja Bapenda Kota

Bekasi Tahun 2024.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah termasuk Badan tipe A pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, merupakan sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Bapenda mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Bapenda dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Selain itu kepala Bapenda juga dibantu oleh empat kepala bidang, yaitu :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang

meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2. Pelayanan, Pelaporan dan Sistem

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah, pelaporan dan pembukuan serta sistem dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusandi bidangnya.

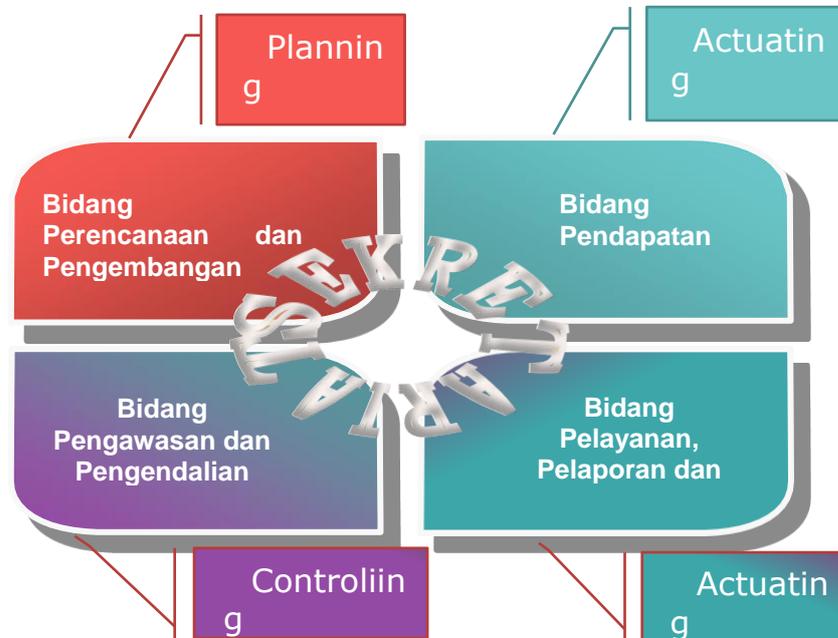
3. Bidang Pendapatan Daerah

yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendaftaran dan penetapan pajak daerah, pendataan dan penilaian pajak daerah serta retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

4. Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengawasan pajak dan retribusi daerah serta penagihan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Gambar 1.2
Skema Design Kelembagaan Bapenda
Kota Bekasi.



Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Koordinator Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Administrasi, Konsultasi dan Informasi, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan;
 - c. Sub Koordinator Bidang Sistem dan Data.
5. Bidang Pendapatan Daerah, Membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
 - c. Sub Koordinator Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Sub Koordinator Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;.

7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah

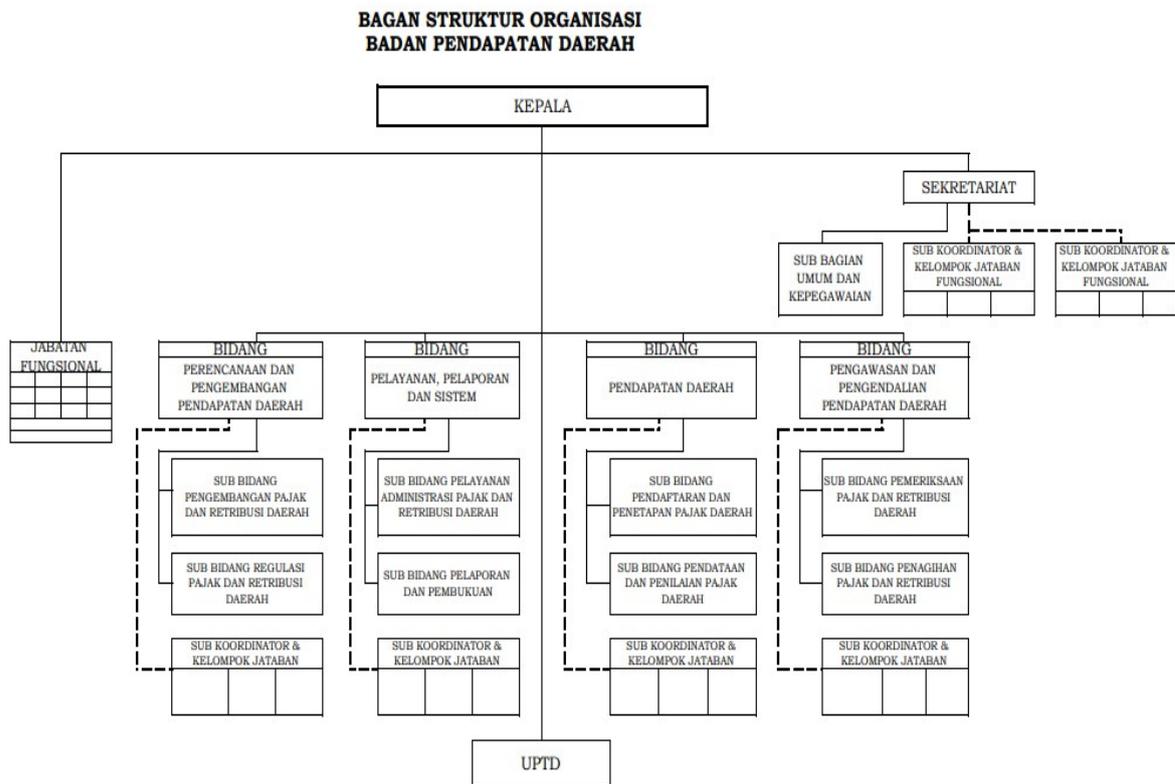
Terdiri 12 UPTD Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kecamatan se Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Gambar 1.3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA

1.3. Sumber Daya

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**



1.3.1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024 Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 447 aparatur sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	STRUKTURAL			PELAKSANA			JML	GOLONGAN				PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN		PNS	
		ES S II	ES S III	ES S IV	PN S	JF T	TK K		I V	III	II	I	S2	S1	D3	SM A	S MP	L	P	P	L
1	Sekretariat	1	1	2	17	2	27	50	2	17	4	-	5	27	5	13	0	24	26	14	9
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	-	1	3	10		10	24	0	11	3	-	4	17	3	0	0	14	10	5	9
3	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	-	1	3	23		27	54	3	18	6	-	7	27	7	13	0	33	21	10	17
4	Bidang Pendapatan Daerah	-	1	3	30		33	67	1	26	7	-	6	41	8	12	0	32	35	16	18
5	Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem	-	1	3	24	5	39	72	1	30	2	-	4	53	7	8	0	37	35	16	17
6	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Timur	-	-	1	7		8	16	-	7	1	-	0	15	0	1	0	11	5	2	6
7	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Utara	-	-	1	2		16	19	0	2	1	-	0	11	2	5	0	14	5	0	3
8	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Barat	-	-	0	7		10	17	0	4	2	1	0	8	1	7	1	13	4	1	6
9	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Selatan	-	-	1	7		20	28	0	5	3	0	1	11	3	12	0	21	7	3	5
10	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Rawalumbu	-	-	1	3		11	15	1	3	0	-	1	9	0	5	0	10	5	1	3
11	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Medan Satria	-	-	1	4		10	15	0	4	1	-	2	8	1	5	0	10	5	0	5
12	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatiasih	-	-	1	4		6	11	0	4	1	-	1	6	0	5	0	6	5	1	4
13	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bantar Gebang	-	-	1	3		4	8	1	3	0	-	1	4	0	3	0	6	2	0	4
14	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondok Gede	-	-	1	3		5	9	-	2	2	-	2	4	0	3	0	6	3	1	3
15	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jati Sampurna	-	-	1	6		11	18	-	5	2	0	0	8	3	6	0	14	4	2	5

NO	SATUAN KERJA	STRUKTURAL			PELAKSANA			JML	GOLONGAN				PENDIDIKAN					JENIS KELAMINAN		PNS	
		ES S II	ES S III	ES S IV	PNS	JFT	TKK		I V	III	II	I	S2	S1	D3	SM A	S M P	L	P	P	L
16	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondok Melati	-	-	1	3		7	11	0	3	1	0	0	7	1	4	0	8	3	2	2
17	UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Mustika Jaya	-	-	1	7		5	13	-	7	1	-	1	8	0	4	0	7	6	4	4
J U M L A H		1	5	25	160	7	249	447	9	151	37	1	35	264	41	106	1	266	181	78	120
TOTAL PEGAWAI		447																			

JUMLAH ESSELON + PNS + JFT 198
JUMLAH TTK 249
JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI 447

Berdasarkan table di atas dari 447 orang aparatur Bapenda Kota Bekasi tersebar di seketariat, bidang-bidang dan 12 UPTD diwilayah Kecamatan se Kota Bekasi.

1.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2

Daftar Volume Dan Kondisi Barang S/D Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah

No.	Nama Barang	Volume	BMD 2023	Jumlah sd 2023	BMD 2024	Jumlah sd 2024
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	32	1	32	4	35
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	88	1	88	-	88
3	PC Unit	411	48	411	40	451
4	Laptop	19	9	19	8	27
5	Note Book	29	-	29	3	31
6	Printer	235	19	235	23	258
8	AC	119	4	119	17	136
9	Rak Arsip	225	-	225	-	225
10	Scanner	42	3	42	15	57
11	Mesin Ketik Manual	10	-	10	-	10

No.	Nama Barang	Volume	BMD 2023	Jumlah sd 2023	BMD 2024	Jumlah sd 2024
12	Mesin Ketik Elektrik	20	-	20	-	20
13	Mesin Foto Copy	2	-	2	2	2
14	Filling Besi	73	-	73	-	73
15	Brangkas	2	-	2	-	2
16	Mesin Absensi	24	8	24	-	24
17	Mesin Perporasi	5	-	5	-	5
18	Meja Rapat	6	2	6	-	6
19	Televisi	12	1	12	12	24
20	Kursi	488	90	488	-	488
21	Meja	316	40	316	-	316
22	Mesin Penghancur	18	4	18	1	19
23	Lemari Compacto	8	-	8	-	8

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 35 dikatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi,A. dan Iskandar, E. 1995. Cara Membaca APBD . Malang: Brawijaya University Press).

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Desember 2022 merilis terdapat 20 daerah yang mandiri, indikasi kemandirian berdasarkan kemandirian anggaran keuangan daerah tidak tergantung dengan anggaran pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dari Transfer ke Daerah (TKD) (finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6465184/kemendagri).

Kemandirian keuangan daerah menjadi faktor kunci tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta terwujudnya daerah yang maju

dan sejahtera ([https://www.bpkp.go.id/index.php?/berita/read/31323/0/optimisasi-pendapatan-daerah-untuk-mewujudkan-kemandirian-fiskal- daerah](https://www.bpkp.go.id/index.php?/berita/read/31323/0/optimisasi-pendapatan-daerah-untuk-mewujudkan-kemandirian-fiskal-daerah)).

Berdasarkan keterangan di atas posisi strategis Bapenda Kota Bekasi sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah jelas sangat strategis, karena kemampuan pendanaan pembangunan sebagai wujud dari kemandirian daerah ada di besaran penerimaan PAD secara keseluruhan dari Pendapatan Daerah.

Suatu tantangan besar harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk dapat mewujudkan peningkatan penerimaan PAD sebagai ujung tombak dalam merealisasikan pembangunan di Kota Bekasi. Dengan sebaran potensi PAD di Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah Utara : Kabupaten Bekasi, sebelah Timur : Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta, dan jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak \pm 2.468.448 Jiwa, yang terdiri dari Pria sebanyak 1.238.339 jiwa dan wanita sebanyak 1.230.109. Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus hambatan yang harus dapat diselesaikan oleh Bapenda Kota Bekasi.

Tingginya belanja pemerintah yang diperuntukan membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran Rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemandirian fiskal dalam mewujudkan pembangunan daerah rata-rata di Kabupaten/Kota hanya mampu mencapai 30% sd 40% dari seluruh anggaran yang tersedia, hal ini tentunya dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan dari dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Optimalisasi pengelolaan PAD untuk meningkatkan penerimaan PAD menjadi sangat strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal sehingga mampu membiayai pembangunan di wilayah. Kota Bekasi sebagai pemerintahan daerah TK II berusaha membangun wilayahnya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 perlu dukungan dana pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, untuk itu peran Bapenda Kota Bekasi dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah melalui Optimalisasi Penerimaan PAD sangatlah vital agar dapat terwujud rencana tersebut, dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan Sumber Daya Aparatur serta Perlengkapan dalam menjalankan organisasi.

1.5. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 2 (dua) Program dan 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Kegiatan Utama pada Bapenda Kota Bekasi adalah melaksanakan Optimalisasi Penerimaan PAD dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat Kota Bekasi. Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan anggaran dalam APBD Perubahan sebesar 378 Milyar Rupiah, hal ini dikarenakan untuk optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan juga pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD pada Revisi RPD Pemerintah Kota Bekasi, maka Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi melaksanakan program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.5.1. Kegiatan

1.5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. *Pengadaan Barang Milik Daerah*

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.5.1.2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Persentase peningkatan PAD dengan kegiatan:

1. *Pengelolaan Pendapatan Daerah*

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 9) Penagihan Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 13) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 14) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi

kewenangannya sebagai unsur pendukung unsur pemerintahan, pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 190.429.061.185 (seratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang dialokasikan kedalam 2 Program, 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Anggaran di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalami penambahan senilai Rp 378.305.386.476 yang dikarenakan pada APBD murni inputan nilai insentif Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan target penerimaan Pajak Daerah sehingga pada APBD Perubahan ada penambahan nilai pagu untuk insentif (kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), pembuatan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2023 (Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah), dan Penagihan Piutang Pajak Daerah (Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah).

1.5.2. *Layanan Bapenda Kota Bekasi*

Sebagai Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dan Bidang Urusannya adalah tentang Keuangan Daerah khususnya tentang Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan pendekatan fungsi menghasilkan produk layanan seperti:

1. Tersusunnya target pendapatan daerah;
2. Tersusunnya regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Tersosialisasikannya Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tersedianya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(NPWP/DR);
5. Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD);

6. Tersedianya data dan Penilaian tentang Pajak Daerah;
7. Tersedianya layanan langsung ke masyarakat sebanyak 20 jenis pelayanan PBB dan BPHTB;
8. Tersedianya pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
9. Tersedianya Sistem pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Tersedianya data hasil pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
11. Tersedianya data hasil Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap WP/WR yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku;
12. Tersedianya data hasil penagihan terhadap WP/WR dan pengurangan piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Mengukur Capaian Kinerja Organisasi, Capaian Indikator Kinerja Utama serta Realisasi Anggaran

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 8) Akuntabilitas Anggaran
Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rentra Bapenda Kota Bekasi

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik- taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 57).

Kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur sebagai berikut (Mathis dan Jackson,2006,378):

1. Kuantitas dari hasil;
2. Kualitas dari hasil;
3. Ketepatan waktu dari hasil;
4. Kehadiran;
5. Kemampuan untuk bekerjasama.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 22).

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk masa transisi pada saat pilkada serempak periode 3 (tiga) tahun

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut Kota Bekasi merumuskan 5 tujuan Kota Bekasi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bapenda Kota Bekasi adalah tujuan pertama yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”. Berdasarkan RPD tersebut Bapenda Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai pembangunan di Kota Bekasi. Untuk itu Bapenda dalam perencanaan kerjanya mengkhhususkan pada upaya-upaya Peningkatan Penerimaan PAD dan Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bapenda Kota Bekasi

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. (Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1)).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 yang sudah melalui proses Verifikasi dari Bappeda Kota Bekasi memuat tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan PAD	0.01	18.99	3.90
		Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	4.59	21.45	3.59
2	Meningkatkan Mewujudka n Tatakelola organisasi pemerintahan an yang baik		Predikat Nilai AKIP	BB	BB	BB
		Meningkatnya Nilai Akip	Nilai AKIP	79	79.50	79.75

Renstra Bapenda 2024-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Bapenda Kota Bekasi Peningkatan Penerimaan PAD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama Bapenda Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU KOTA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD			$\frac{\text{Realisasi PAD tahun n} - \text{Realisasi PAD Tahunn-1}}{\text{Realisasi PAD n-1}} \times 100\%$	IKU KOTA	0,01	Kepala Badan	Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentase peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi PDRD tahun n} - \text{Realisasi PDRD Tahunn-1}}{\text{Realisasi PDRD n-1}} \times 100\%$	Prosentase peningkatan PDRD	4,59%	Kepala Badan	Proses Bisnis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada pada Bidang-Bidang : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI		IKU KOTA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Nilai	Predikat				
									Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Yang Baik	Predikat Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	Predikat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (79)	Kepala Badan	Seluruh data Kinerja yang berada pada Bapenda Kota Bekasi Sekretariat Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah
				> 85-100	AA				
				> 80-90	A				
				> 70-80	BB				
				> 60-70	B				
				> 50-60	CC				
				> 30-50	C				
				> 0-30	D				

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Bapenda Kota Bekasi 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target

per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Program dan Kegiatan (Tabel 2.4) :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran : 2024

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	0,01%
2	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai AKIP	79

Jumlah Anggaran

190.429.061.485

1 Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

186.172.398.235

2 Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

4.256.663.250

Tabel 2.4

**Program dan Kegiatan Setelah Perubahan
Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN		PAGU TA 2024	PAGU PERUBAHAN TA 2024
			SEBELUM	SESUDAH		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN		PAGU TA 2024	PAGU PERUBAHAN TA 2024
			SEBELUM	SESUDAH		
5.2	Keuangan				187.876.324.991	190.429.061.485
5.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	181.564.300.741	186.172.398.235
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Laporan	100%	10.000.000	0
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen 210 Orang/Bulan	100%	129.639.906.000	127.342.122.600
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5670 Orang/Bulan	5670 Orang/Bulan	129.631.906.000	127.342.122.600
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	8.000.000	0
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	150.000.000	150.000.000
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	150.000.000	150.000.000
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.713.622.000	2.713.622.000
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.000.000	100.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN		PAGU TA 2024	PAGU PERUBAHAN TA 2024
			SEBELUM	SESUDAH		
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 Paket	68 Paket	1.178.000.000	1.178.000.000
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	30 Paket	785.622.000	785.622.000
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	382 Dokumen	382 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	400.000.000	400.000.000
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	900 Dokumen	900 Dokumen	150.000.000	150.000.000
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.074.324.750	2.074.324.750
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	117 Unit	2.074.324.750	2.074.324.750
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	44.226.447.991	51.142.328.885
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	264 Laporan	12 Laporan	966.750.000	966.750.000
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3036 Laporan	12 Laporan	43.249.697.991	50.165.578.885
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.750.000.000	2.750.000.000
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	300.000.000	300.000.000
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	111 Unit	111 Unit	400.000.000	400.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN		PAGU TA 2024	PAGU PERUBAHAN TA 2024
			SEBELUM	SESUDAH		
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	602 Unit	602 Unit	500.000.000	500.000.000
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.550.000.000	1.550.000.000
4,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.312.024.250	4.256.663.250
4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	100%	100%	6.312.024.250	4.256.663.250
4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	106.200.000
4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000
4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	217.706.250	181.006.250
4.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	109 Unit	2 Unit	284.000.000	284.000.000
4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	137.385.000	137.385.000
4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lpaoran	12 Laporan	750.000.000	750.000.000
4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.428.000	981.384.000
4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	4 Layanan	190.000.000	195.000.000
4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	0 Dokumen	1.206.817.000	0
4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	476.898.000	476.898.000
4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN		PAGU TA 2024	PAGU PERUBAHAN TA 2024
			SEBELUM	SESUDAH		
		Daerah				
4.2.01.1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	148.228.000	143.228.000
4.2.01.1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	47.848.000	47.848.000
4.2.01.1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	653.714.000	653.714.000

Terlihat pada table di atas Pagu Anggaran Program dan Kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi sebelumnya adalah sebesar 187.876.324.991 menjadi 190.429.061.485 mengalami penambahan sebesar 378.305.386.476 penambahan anggaran didominasi untuk keperluan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah karena pada saat pagu awal menginput ke SIPD terdapat kekurangan anggaran dalam peruntukan insentif.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 973/Kep.10680.A-Bapenda/XI/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (SOP-AP)), tanggal 16 November 2022.

Adapun komponen data dan rumus perhitungan capaian kinerja pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

**Inventarisir Komponen Data dan Rumus Perhitungan Badan Pendapatan Daerah
Kota Bekasi**

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM		INDIKATOR	KOMPONEN DATA	RUMUS PERHITUNGAN
Tujuan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Data Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Desember 2024 dan data Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Terupdate sampai dengan saat ini	$\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun N} - \text{PAD Tahun N-1}}{\text{Penerimaan PAD Tahun N-1}} \times 100$
Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Data Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Desember 2024 dan data Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Terupdate sampai dengan saat ini	$\frac{\text{Penerimaan PDRD Tahun N} - \text{Penerimaan PDRD Tahun N-1}}{\text{Penerimaan PDRD Tahun N-1}} \times 100$
Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Data Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Sekarang	$\frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100$
		Persentase Piutang Terbayarkan	Data Piutang dan penagihan piutang pajak daerah	$\frac{\text{Data Piutang Pajak Tahun N}}{\text{Data Piutang Tertaguh Tahun N}} \times 100$
		Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik	Nilai Survey IKM pada Bapenda Kota Bekasi	Hasil Penilaian Survey dari pihak Independent
Tujuan	Mewujudkan Tatakelola organisasi pemerintahan yang baik	Predikat Nilai AKIP	Data Kinerja Komponen AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Predikat SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi dari Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Data Kinerja Komponen AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi dari Inspektorat
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan
		2 Optimalisasi	Dokumen	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM		INDIKATOR	KOMPONEN DATA	RUMUS PERHITUNGAN
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Diklat	dan pelatihan
		3 Optimalisasi Disiplin Aparatur	Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai
		4 Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Data Pegawai Non ASN	Jumlah Pegawai Non ASN
		5 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Data Aset Milik Bapenda	Jumlah Aset Milik Bapenda

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja yang telah dicapai Bapenda Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Bapenda Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Adapun target dan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.2

Target dan Realisasi Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	4.59	17.42	379.52%
			Nilai			

2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB 79	BB 78.07	98,82%
---	-------------------------	------------	--	----------	-------------	--------

Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2024-2026. Melihat tabel di atas secara keseluruhan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 masih kategori baik dalam pencapaiannya Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi dan indikatornya Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi dengan capaian kinerja 98.82%.

3.1.2. Capaian Indikator Program

Tabel. 3.3

Target dan Realisasi Indikator Program

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	56.51	44.96	79.56%
2	Persentase Peningkatan Jumlah WP	%	1.50	1.17	78%
3	Persentase Piutang Terbayarkan	%	8	7.03	87.88%
4	Nilai IKM	Nilai	86.25	86.37	100.14%

Berdasarkan table di atas capaian kinerja untuk eselon III para Kepala Bidang dilingkungan Bapenda Kota Bekasi yakni terhadap capaian indikator program terlihat ada 3 capaian indikator program yang tidak tercapai dan 1 indikator program yang melebihi capaian target.

3.1.3. Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI			SILPA
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)	
A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	190.429.061.485	133.591.286.855	70,15	98,03	56.837.774.630
I	Keuangan	190.429.061.485	133.591.286.855	70,15	98,03	56.837.774.630
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	186.172.398.235	129.753.281.649	69,70	98,05	56.419.116.586
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.342.122.600	85.232.097.659	66,93	98,00	42.110.024.941
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.342.122.600	85.232.097.659	66,93	98,00	42.110.024.941
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	64.640.000	43,09	100,00	85.360.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	64.640.000	43,09	100,00	85.360.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.713.622.000	2.305.759.318	84,97	100,00	407.862.682
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	89.156.000	89,16	100,00	10.844.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.178.000.000	956.039.000	81,16	100,00	221.961.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	785.622.000	719.680.700	91,61	100,00	65.941.300
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	93.922.320	93,92	100,00	6.077.680
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	317.075.274	79,27	100,00	82.924.726
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	129.886.024	86,59	100,00	20.113.976
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.074.324.750	1.930.275.000	93,06	100,00	144.049.750
11	Pengadaan Peralatan dan	2.074.324.750	1.930.275.000	93,06	100,00	144.049.750

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI			SILPA
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)	
	Mesin Lainnya					
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.142.328.885	37.861.775.574	74,03	98,04	13.280.553.311
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	-	100,00	10.000.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	966.750.000	707.710.948	73,21	100,00	259.039.052
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.165.578.885	37.154.064.626	74,06	98,00	13.011.514.259
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.750.000.000	2.358.734.098	85,77	97,18	391.265.902
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	188.919.734	62,97	100,00	111.080.266
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	253.144.352	63,29	100,00	146.855.648
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	487.900.000	97,58	100,00	12.100.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.550.000.000	1.428.770.012	92,18	95,00	121.229.988
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.256.663.250	3.838.005.206	90,16	97,20	418.658.044
H	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.256.663.250	3.838.005.206	90,16	97,20	418.658.044
19	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	106.200.000	104.898.540	98,77	100,00	1.301.460
20	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	300.000.000	286.597.770	95,53	100,00	13.402.230
21	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	181.006.250	151.356.250	83,62	100,00	29.650.000
22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	284.000.000	221.841.414	78,11	100,00	62.158.586
23	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	137.385.000	135.932.500	98,94	100,00	1.452.500
24	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	750.000.000	720.484.550	96,06	100,00	29.515.450
25	Penetapan Wajib Pajak Daerah	981.384.000	966.499.480	98,48	100,00	14.884.520
26	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	195.000.000	163.410.144	83,80	100,00	31.589.856
27	Penelitian dan Verifikasi	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI			SILPA
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)	
	Data Pelaporan Pajak Daerah					
28	Penagihan Pajak Daerah	476.898.000	348.190.000	73,01	75,00	128.708.000
29	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
30	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	143.228.000	109.374.500	76,36	100,00	33.853.500
31	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	47.848.000	47.117.250	98,47	100,00	730.750
32	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	653.714.000	582.302.808	89,08	100,00	71.411.192

Sumber: Aplikasi Simpelbang di akses 10 Januari 2025

Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 133.591.286.855,- atau sebesar 70.15%, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 98.03%. Realisasi fisik kegiatan/sub kegiatan tidak mencapai target 100% dikarenakan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat diserap semua dikarenakan tidak tercapainya target PAD.

Dari hal capaian di atas penjelasan lebih detailnya terhadap keberhasilan dan ketidak tercapaian akan dijelaskan di sub bab selanjutnya.

3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu

3.2.1. Perbandingan Sasaran Strategis dengan Tahun Lalu

1. Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tabel. 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2023	2024
1	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	5.87%	17.42%

Dari table di atas dapat dijelaskan ada kenaikan pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 ke tahun 2024 realisasi capaian sebesar 379.52% yakni dari target sebesar 4.59% terealisasi sebesar 17.42%. hal ini dikarenakan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 1.092.018.365.053, tahun 2023 sebesar 2.214.734.473.304 dan pada tahun 2024 sebesar 2.600.584.756.729 sehingga jika dihitung peningkatan pertahunnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 5.87% dan pada tahun 2024 sebesar 17.42% :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi PAD Dengan Tahun Lalu

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	+/_ (%)
PAJAK DAERAH	2.138.931.349.928	2.056.930.041.230	-82.001.308.698	-3,83%
PBJT Jasa Hotel	39.453.094.061	39.371.109.938	-81.984.123	-0,21%
PBJT Makanan dan/atau Minuman	411.463.438.722	437.015.742.112	25.552.303.390	6,21%
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	53.040.567.050	42.582.844.401	-10.457.722.649	-19,72%
Pajak Reklame	73.021.058.158	77.555.204.965	4.534.146.807	6,21%
PBJT Tenaga Listrik	405.619.022.350	440.057.165.205	34.438.142.855	8,49%
PBJT Jasa Parkir	43.897.283.154	22.736.734.579	-21.160.548.575	-48,20%
Pajak Air Bawah Tanah	4.044.487.621	4.952.312.688	907.825.067	22,45%
Pajak Bumi dan Bangunan PBB	469.231.187.214	483.516.383.026	14.285.195.812	3,04%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	639.161.211.598	509.142.544.316	-130.018.667.282	-20,34%
RETRIBUSI DAERAH	75.803.123.376	543.654.715.499	467.851.592.123	617,19%
Retribusi Jasa Umum	41.818.819.441	515.320.750.809	473.501.931.368	1132,27%
Retribusi Jasa Usaha	14.222.556.085	8.920.934.612	-5.301.621.473	-37,28%
Retribusi Perizinan Tertentu	19.761.747.850	19.413.030.078	-348.717.772	-1,76%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.633.480.184	13.707.744.208	3.074.264.024	28,91%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot		1.505.924.153	1.505.924.153	0,00%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab &		0	0	0,00%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	+/_ (%)
Kota Bekasi				
Bagian Laba dari BPR Syariah	3.546.502.902	4.672.657.920	1.126.155.018	31,75%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	6.986.977.282	6.352.102.298	-634.874.984	-9,09%
Bagian Laba dari Perseroda Migas	100.000.000	1.177.059.837	1.077.059.837	1077,06%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	526.850.744.456	89.129.931.408	-437.720.813.048	-83,08%
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	869.897.061	1.546.412.800	676.515.739	77,77%
Penerimaan Jasa Giro	10.666.256.620	8.247.949.188	-2.418.307.432	-22,67%
Pendapatan Bunga Deposito	17.963.835.639	20.812.683.060	2.848.847.421	15,86%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31.499.305	2.360.299.059	2.328.799.754	7393,18%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	234.513.706	838.443.546	603.929.840	257,52%
Pendapatan dari Pengembalian	31.712.247.754	44.682.675.918	12.970.428.164	40,90%
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	7.551.319.454	1.544.690.944	-6.006.628.510	-79,54%
Pendapatan Denda Pajak	13.588.094.297	8.392.426.812	-5.195.667.485	-38,24%
Pendapatan Denda Retribusi	0	0	0	0,00%
Pendapatan BLUD	440.944.799.196	0	-440.944.799.196	-100,00%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	3.288.281.424	704.350.081	-2.583.931.343	-78,58%
JUMLAH	2.752.218.697.944	2.703.422.432.345	-48.796.265.599	-1,77%

Sumber Data : Sub Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi Tahun per- 31 Desember 2024

Berdasarkan table di atas terdapat penurunan capaian dari sektor pajak sebesar - 3.83%, untuk sektor retribusi terdapat peningkatan sebesar 617.19%, sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdapat peningkatan sebesar 28.91% dan untuk sektor Lain-Lain PAD Yang Sah juga mengalami penurunan sebesar -83.04%, secara keseluruhan kelesluruhan penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar 1.17%

2 Meningkatnya Nilai AKIP

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi AKIP Bapenda Kota Bekasi Dengan Tahun Lalu

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2023	2024
2	Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Predikat/Nilai	BB 79.10	BB 78.07

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 realisasi capaian sebesar 79.10 poin dan tahun 2024 realisasi capaian sebesar 78.07 poin sehingga terjadi penurunan pencapaian nilai sebesar 01.02 poin akan tetapi Bapenda Kota Bekasi masih berada pada kategori penilaian BB

3.2.2. Perbandingan Indikator Program

1. Indikator Program Penerimaan PAD Terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel. 3.15

Realisasi Pendapatan Daerah

PENERIMAAN PAD DAN PENDAPATAN DAERAH	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	
	2023	2024
PAD	2.752.218.697.944	2.703.422.431.345
PENDAPATAN DAERAH	6.130.649.851.900	6.012.333.145.855
RASIO	49.76%	44.96%

Sumber Data : Sub Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi Tahun per- 31 Desember 2024

Berdasarkan table di atas pencapaian Pendapatan Daerah dan PAD kesemuanya mengalami penurunan penerimaan, pada tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 49.76% dan tahun 2024 sebesar 44.96% sehingga mengalami penurunan nilai sebesar 4.80%.

2. Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah.

Tabel. 3.16
Rekapitulasi Data Wajib Pajak Daerah

NO	PAJAK	WAJIB PAJAK	
		2023	2024
1	Hotel	134	135
2	Restoran	2.989	3.262
3	Hiburan	337	429
4	Reklame	13.468	14.807
5	Penerangan Jalan	63	63
6	Parkir	317	312
7	Air Tanah	1.388	1.586
8	PBB	703.789	713.881
9	BPHTB	25.119	21.908
JUMLAH		747.604	748.432
PROSENTASE KENAIKAN		0.14%	1.17%

Sumber data SIMPATDA, SISMIOP dan E-BPHTB)

Berdasarkan table di atas pencapaian Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah mengalami peningkatan yakni yang semula tahun 2023 capaian kenaikan sebesar 0.14% dan pada tahun 2024 pencapaiannya mencapai 1.17% atau ada peningkatan sebesar 1.03%

3. Persentase Piutang Terbayarkan

Tabel. 3.17
PERSENTASE PIUTANG TERBAYARKAN

PIUTANG	REALISASI			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
PIUTANG	1.099.656.385.414	1.099.656.385.414	1.099.656.385.414	1.099.656.385.414
Hotel	1.285.190.352	1.285.190.352	1.285.190.352	1.285.190.352
Restoran	7.397.502.470	7.397.502.470	7.397.502.470	7.397.502.470
Hiburan	634.981.373	634.981.373	634.981.373	634.981.373
Parklr	352.848.208	352.848.208	352.848.208	352.848.208
Reklame	9.156.818.808	9.156.818.808	9.156.818.808	9.156.818.808
Penerangan Jalan	16.242.443	16.242.443	16.242.443	16.242.443
Air Tanah	1.305.790.527	1.305.790.527	1.305.790.527	1.305.790.527

PIUTANG	REALISASI			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
PBB	1.079.507.011.233	1.079.507.011.233	1.079.507.011.233	1.079.507.011.233
BPHTB	-			
TERTAGIH	18.661.550.064	35.258.760.681	61.381.217.493	77.311.752.640
Hotel	336.889.515	678.891.588	842.049.162	842.449.182
Restoran	3.059.381.105	3.096.951.408	3.190.816.512	3.269.116.424
Hiburan	92.735.481	92.735.481	98.702.381	105.739.236
Parklr	75.129.223	83.081.383	103.168.183	113.641.868
Reklame	2.431.113.100	2.462.777.000	2.473.329.200	2.495.711.000
Penerangan Jalan	-	-	-	-
Air Tanah	339.152.900	346.697.500	350.203.300	350.203.300
PBB	12.327.148.740	28.497.626.321	54.322.948.755	70.134.891.630
BPHTB				
RASIO	1,70%	3,21%	5,58%	7,03%

Pada tahun 2023 jumlah WP keseluruhan dikurangi WP PBB dan WP BPHTB serta WP PPJU adalah sebesar 18.633 WP dan WP yang diperiksa pada tahun 2023 sebanyak 200 WP sehingga menurut rumus perhitungan mencapai 98.03%

4. Nilai IKM

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Nilai IKM Dengan Tahun Lalu

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2023	2023
4	Nilai IKM	Nilai	86.57	86.37

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan table di atas pencapaian Nilai IKM mengalami penurunan yakni yang semula tahun 2023 capaian kenaikan sebesar 86.57 dan pada tahun 2023 pencapaiannya mencapai 86.37 atau ada penurunan poin sebesar 0.20%

3.2.3. Perbandingan Program dan Kegiatan

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan Dengan Tahun Lalu

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		2023	2024	%	
	Badan Pendapatan Daerah	148.846.369.879	133.591.286.855	99,95	98,03
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	144.812.588.251	129.753.281.649	99,95	98,05
<i>1</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.137.700.425	85.232.097.659	100,00	98,00
2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.137.700.425	85.232.097.659	100,00	98,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	462.485.240	64.640.000	87,7	100,00
4)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	335.895.000	0,00	100,00	0,00
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126.590.240	64.640.000	75	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.714.432.157	2.305.759.318	100,00	100,00
6)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.302.000	89.156.000	100,00	100,00
7)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	453.530.000	0,00	100,00	0,00
8)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.266.918.200	956.039.000	100,00	100,00
9)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	310.801.250	719.680.700	100,00	100,00
10)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	86.330.000	93.922.320	100,00	100,00
11)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.954.332	317.075.274	100,00	100,00
12)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	136.596.375	129.886.024	100,00	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.909.001	1.930.275.000	100,00	100,00
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.909.001	1.930.275.000	100,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.296.977.282	37.861.775.574	98,04	100,00
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	100,00	100,00
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.904.778	707.710.948	100,00	100,00
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.746.072.504	37.154.064.626	98,00	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.223.729	2.358.734.098	97,18	100,00
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.008.402	188.919.734	100,00	100,00
18)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.345.327	253.144.352	100,00	100,00
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.395.000	487.900.000	100,00	100,00
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.475.000	1.428.770.012	95,00	100,00
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.315.361.695	3.838.005.206	100,00	97,20
8	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.315.361.695	3.838.005.206	100,00	97,20
21)	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	25.820.000	104.898.540	100,00	100,00
22)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	97.806.250	286.597.770	100,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				%	
		2023	2024	2023	2024
	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				
23)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	204.978.800	151.356.250	100,00	100,00
24)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	59.737.850	221.841.414	100,00	100,00
25)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	173.022.500	135.932.500	100,00	100,00
26)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.206.165.695	720.484.550	100,00	100,00
27)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	714.564.950	966.499.480	100,00	100,00
28)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	271.344.000	163.410.144	100,00	100,00
29)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30)	Penagihan Pajak Daerah	277.557.400	348.190.000	100,00	100,00
31)	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
32)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	242.064.250	109.374.500	100,00	100,00
33)	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42.300.000	47.117.250	100,00	100,00
34)	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	582.302.808	0,00	100,00
	TOTAL	134.275.464.900	133.591.286.855	99,95	98,03

Berdasarkan table di atas baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik semuanya mengalami kenaikan capaian, untuk realisasi keuangan secara keseluruhan mengalami pengurangan sebesar Rp.-684.178.045 dan untuk realisasi fisik mengalami kenaikan sebesar -1.92%

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

3.3.1 Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Dengan Renstra

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi dan Target Sasaran Srategis Periode Renstra

NO	URAIAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2024	2025	2026	HASIL AKHIR
1	TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN						
	TARGET NILAI	Meningkatnya Penerimaan PAD	Prosentase Peningkatan PAD	3.112.184.848.000	3.703.070.218.000	3.847.507.498.000	10.662.762.564.000
	TARGET PERSENTASE			0,01%	18,99%	3,90%	3,90%

2	TARGET NILAI	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	2.661.684.615.000	3.232.531.474.000	3.348.593.888.000	9.242.809.977.000
	TARGET PERSENTASE			4,59%	21,45%	3,59%	3,59%
3	TARGET NILAI PREDIKAT	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB
	TARGET NILAI			79	79,50	79,75	79,75

Sumber Data Proyeksi Pendapatan Daerah pada RPD dan Renstra Bapenda 2024 - 2026

KETERANGAN

	Target Tujuan
	Target Sasaran
	Target Sasaran

Berdasarkan table di atas untuk capaian sasaran Tujuan persentase peningkatan penerimaan PAD sampai dengan akhir periode perencanaan Renstra dengan menghitung hasil akhir dari tahun 2024 sampai dengan 2026 mencapai 10.662.762.564.000 dan untuk target peningkatan pajak dan retribusi daerah hasil akhir sebesar 9.242.809.977.000 serta untuk sasaran strategis nilai AKIP perhitungannya hasil akhir dari nilai yang ingin dicapai yakni dengan target 79.75 atau predikat BB, capaian Target dan Realisasi yang ingin dicapai dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Peningkatan PAD Tahun 2024-2026

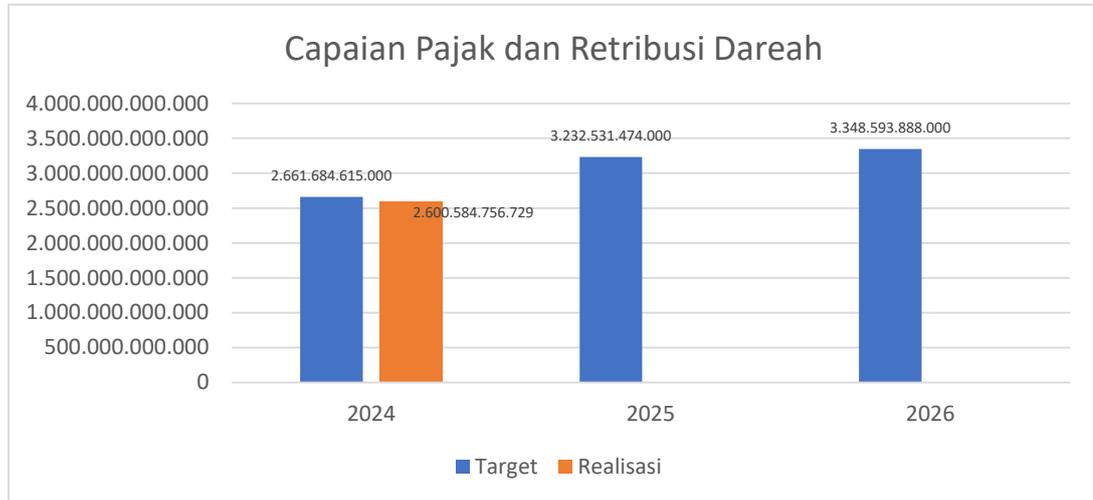


Diawal tahun perencanaan yakni pada tahun 2024 terlihat bahwasanya peningkatan PAD belum mencapai apa yang sudah direncanakan, terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 target PAD terealisasi sebesar 2.703.422.431.345 sehingga terdapat kekurangan nilai dari tahun yang direncanakan sebesar -408.762.416.655 hal ini dikarenakan : Rendahnya capaian PAD di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian PAD tahun 2023 disebabkan beberapa faktor :

1. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang HKPD, terdapat penurunan besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta hilangnya beberapa potensi penerimaan Retribusi Daerah yang meliputi :
 - a. Penurunan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 - 1) Pajak Parkir yang awalnya sebesar 30% menjadi 10%;
 - 2) Pajak Hiburan Ketangkasan yang awalnya sebesar 25% menjadi 10%;
 - 3) Beralihnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mempengaruhi metode perhitungan besaran tarif yang digunakan. Dimana Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih rendah setengahnya di bandingkan dengan perhitungan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Potensi Retribusi yang sudah tidak dikenakan biaya :
 - 1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp5.639.414.900,00;
 - 2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp2.496.766.712,00;
 - 3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp524.296.600,00;
 - 4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 5) Retribusi Terminal, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp1.410.338.975,00;

- 6) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
2. Rendahnya penerimaan dari sumber BPHTB yang disebabkan :
 - a. Batalnya penyesuaian NJOP PBB-P2 di tahun 2024 yang diasumsikan akan dapat mendongkrak penerimaan BPHTB;
 - b. Terjadinya keterlambatan dalam penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2024 yang mengakibatkan terlambatnya pembukaan layanan pembayaran BPHTB;
 - c. Terjadinya penurunan transaksi bidang properti di Tahun 2024, berdasarkan data transaksi BPHTB per Oktober 2024 terdapat penurunan transaksi sebesar 6.642 transaksi jika di bandingkan dengan transaksi BPHTB di Tahun 2023;
 - d. Belum adanya peralihan lahan baru yang luas seperti pada tahun 2023 di wilayah Jatisampurna;
 - e. Beberapa pembangunan properti yang sedang berjalan (seperti di Mall Pakuwon dan Sumarecon) belum terdapat transaksi BPHTB, yang kemungkinan besar baru didapatkan pada 2 (dua) tahun mendatang.
 3. Rendahnya penerimaan atas kerjasama pengelolaan pasar yang di pihak ketigakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS), di karenakan pihak pengelola pasar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Pengelola.
 4. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sehingga penerimaan PBB-P2 tidak terjadi peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang menunggak.

Gambar 3.1
Grafik Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2024-2026



Diawal tahun perencanaan yakni pada tahun 2024 terlihat bahwasanya Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 2.600.584.756.729 terdapat kekurangan capaian dari yang direncanakan sebesar -61.099.858.

Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi diawal tahun perencanaan pada tahun 2024 ditargetkan predikat BB dengan nilai 79 terealisasi Predikat BB dengan nilai 78.07 terdapat kekurangan capaian nilai target sebesar -0.93. Adapun rincian terhadap penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
Grafik Nilai AKIP
Tahun 2024-2026

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	2023	2024	2025	2026
1	Perencanaan Kinerja	30	23,91	23,91		
2	Pengukuran Kinerja	30	23,44	23,01		
3	Pelaporan Kinerja	15	11,91	11,81		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,84	19,34		

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	2023	2024	2025	2026
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,10	78,07		
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB		

Nota Dinas LHE Inspektorat Tahun 2024

Terlihat pada table di atas berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Bapenda Kota Bekasi mengalami penurunan nilai dari kesemua unsur penilaian yang dilakukan dengan jumlah nilai pada tahun 2023 sebesar 79.10 dan pada tahun 2024 sebesar 78.07

3.3.2 Perbandingan Kinerja Indikator Program Dengan Renstra

1. Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Program Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Periode Renstra

URAIAN	2024	2025	2026	HASIL AKHIR
TARGET	56,51%	62,50%	62,80%	62,80%
REALISASI	44,96%			
CAPAIAN	79.56%			

Berdasarkan table di atas untuk capaian indicator program persentase PAD terhadap pendapatan daerah diawal periode perencanaan Renstra mengalami kekurangan capaian target sebesar 11.55%.

2. Indikator Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Program Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah Periode Renstra

N O	URAIAN	2024	2025	2026	HASIL AKHIR
1	TARGET	1.50%	1.50%	1.50%	4.50%
2	REALISASI	1.17%			
	CAPAIAN	78%			

Berdasarkan table di atas untuk capaian indikator program Meningkatnya Data Potensi Wajib Pajak Daerah sampai dengan akhir periode perencanaan Renstra mencapai 4.50% dari target yang harus dicapai yakni hasil perhitungan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1.17% terdapat kekurangan target sebesar 0.33%.

3. Indikator Persentase Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Program Persentase Piutang Tertagih Periode Renstra

PIUTANG	PIUTANG TERTAGIH			HASIL AKHIR
	2024	2025	2026	
PIUTANG	8%	8%	8%	24%
TERTAGIH	7,03			
CAPAIAN	87,88%			

Berdasarkan table di atas untuk capaian indikator program Persentase Piutang Tertagih sampai dengan akhir periode perencanaan Renstra mencapai 24% dan terealisasi pada tahun 2024 sampai dengan bulan November sebesar 7.03% kekurangan target 0.97%.

4. Indikator Persentase Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Program Nilai Hasil Survey

Pelayanan Publik Periode Renstra

URAIAN	2024	2025	2026	HASIL AKHIR
TARGET	86.25	86.50	86.75	86.75
REALISASI	86.37			
CAPAIAN	100.14%			

Berdasarkan table di atas untuk capaian indikator program Nilai IKM sampai dengan akhir periode perencanaan Renstra mencapai 86.75 dan terealisasi sebesar 86.37 pada tahun 2024 atau melebihi target 0.12 poin

3.4. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara, Pemerintahan Kabupaten/Kota Sekitar dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

3.4.1 Perbandingan Dengan Realisasi Penerimaan Negara

Tabel. 3.24
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dengan Pemerintah Kota Bekasi

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Nasional	Rp. Triliun	Rp. 2.842,5 Triliun	101,4%
2	Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Rp. 6,9 triliun	Rp. 6,1 triliun	88.41%

sumber data <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/konpers-apbn-kita-awal-tahun> (6 Januari 2025 dan Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas rasio target antara nasional dan Pemerintah Kota Bekasi adalah 0.24% dan rasio realisasi sebesar 0.21%. pendapatan Daerah di Kota Bekasi dibawah 1% dari Pendapatan Negara dan untuk PAD rasio realisasinya sebesar 0.09%

3.4.2 Perbandingan Dengan Realisasi Penerimaan Kabupaten Kota Sekitar

Tabel. 3.25
Realisasi Perbandingan PAD dengan Kab/Kota Tetangga

NO	REALISASI	TAHUN ANGGARAN 2023
-----------	------------------	----------------------------

	PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Asli Kabupaten Bekasi*	3.2 T	2,8 T	87.50%
2	Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*	1,4 T	1,4 T	101,47%
3	Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*	1,7 T	1,8 T	104,78%
4	Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi**	3.3 T	2.7 T	80.69%

*DJPK.kemenkeu.go.id (periode Desember 2024)

** Laporan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi

Realisasi penerimaan pendapatan daerah secara resmi angka penerimaannya adalah hasil audited dari BPK, meskipun angka yang disajikan masih belum resmi masih angka sementara dari hasil pengolahan sub bidang pembukuan dan pelaporan dapat kita tarik sajian keterangan berdasarkan table di atas hasil data yang kami dapat maka dapat ditarik perbandingan sebagai berikut:

1. PAD Kota Bekasi berada pada urutan ke 2 dari target PAD dan Realisasi PAD yang dilaporkan
2. Nilai Nominal baik target maupun realisasi Kota Bekasi terhadap Kabupaten Bekasi masih tertinggal.
3. Kota Bekasi capaian PAD nya masih dibawah. Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

3.5.1. Analisis Capaian Sasaran Strategis

3.5.1.1 Sasaran strategis Pertama

Sasaran Pertama : Meningkatnya Penerimaan PAD Indikator Sasaran

: Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Pada perencanaan capaian strategis pertama yakni Meningkatnya Penerimaan PAD dengan target tahun 2024 adalah sebesar 0.01% dari realisasi peningkatan PAD tahun 2023. Nilai capaian strategis pertama diukur dari realisasi penerimaan

PAD dikurangi realisasi penerimaan tahun 2023 dibagi realisasi penerimaan PAD tahun 2023 dikali 100.

$$\frac{(\text{Realisasi PAD Tahun N} - \text{Realisasi PAD Tahun N-1})}{\text{Realisasi PAD Tahun N-1}} \times 100$$

Tabel 3.26

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	0,01%	-1,77%	-177%

Pencapaian realisasi penerimaan PAD pada Tahun 2024 belum terpenuhi karena beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pada tahun 2024 untuk pajak opsens Pemerintah Kota Bekasi belum memberlakukannya dan baru dilaksanakan pada tahun 2025;
2. Menghandapi kondisi ekonomi beberapa resiko global, seperti arah kebijakan FED yang masih penuh ketidak pastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai Kawasan, serta disrupsi rantai pasok global ;
3. Tahun 2024 terjadi pemilu serentak seluruhan Indonesia
4. Perkembangan WP sampa dengan Bulan Desember 2024 terjadi penurunan pada sektor BPHTB yang merupakan potensi pajak terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2023 terdapat 25.119 menjadi 21.908 pada tahun 2024 atau terjadi penurunan 3.211 WP;
5. Penerimaan Air Tanah masih terkendala dengan lamanya proses permohonan iin perpanjangan SIPA di ESDM Provinsi Jawa Barat;
6. Tingginya animo masyarakat yang beralih dalam penggunaan transportasi

daring yang berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak Parkir;

7. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam dalam membayar kewajibannya;
8. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Pajak Daerah

a. Analisis Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.27
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.320.236.129.552	2.703.422.432.345	81,42%
Pajak Daerah	2.669.791.241.904	2.056.930.041.230	77,04%
Retribusi Daerah	552.173.962.367	543.654.715.499	98,46%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.921.251.298	13.707.744.208	91,87%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83.349.673.983	89.129.931.408	106,93%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subsid Pelaporan dan Pembukuan per-31 Desember 2024

Target PAD tahun 2024 sebesar Rp 3.320.236.129.552 dan terealisasi sebesar Rp. 2.703.422.345 atau 81.42% sehingga terjadi kekurangan capaian sebesar Rp. 616.813.697.207 atau 18.58%.

b. Analisis Pajak Daerah

Tabel 3.26
Realisasi Pajak Daerah

PAJAK DAERH	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
PAJAK DAERAH	2.699.791.241.904	2.056.930.041.230	76,19%
PBJT Jasa Hotel	44.406.219.775	39.371.109.938	88,66%
PBJT Makanan dan/atau Minuman	504.664.141.181	437.015.742.112	86,60%

PAJAK DAERH	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	62.650.425.292	42.582.844.401	67,97%
Pajak Reklame	78.376.164.629	77.555.204.965	98,95%
PBJT Tenaga Listrik	425.214.477.210	440.057.165.205	103,49%
PBJT Jasa Parkir	20.026.915.566	22.736.734.579	113,53%
Pajak Air Bawah Tanah	3.732.407.060	4.952.312.688	132,68%
Pajak Bumi dan Bangunan PBB	661.942.898.569	483.516.383.026	73,05%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	898.777.592.622	509.142.544.316	56,65%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subsid Pelaporan dan Pembukuan per-31 Desember 2024

Permasalahan dalam pencapaian target

1. Terjadi peningkatan target yang signifikan pada sekto pajak BPHTB yang mana pada tahun 2023 target sebesar 587.714.009.850 menjadi 661.942.898.569 atau terjadi kenaikan sebesar 52.93%;
2. Perkembangan WP sampa dengan Bulan Desember 2024 terjadi penurunan pada sektor BPHTB yag merupakan potensi pajak terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2023 terdapat 25.119 menjadi 21.908 pada tahun 2024 atau terjadi penurunan 3.211 WP;
3. Berkurangnya kunjungan ke Hotel, Restoran dan Hiburan dikarenakan terjadinya deflasi ekonomi namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat dan juga nilai rupiah yang terus melemah.
4. Adanya potensi reklame yang terkena proyek strategis nasional serta banyaknya penyelenggaraan reklame yang beralih ke Digitalisasi (media sosial) dan adanya pelarangan iklan rokok dan minuman keras di jalan protokol;
5. Adanya data SPPT PBB yang bermasalah (Double Unslah, Fasos Fasum, alamat tidak dikenal, tidak ada fisik) serta adanya pengusaha palit (yang dalam proses kurator);

c. Analisis Retribusi Daerah

Tabel 3.28
Realisasi Retribusi Daerah

RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
RETRIBUSI DAERAH	552.173.962.367	543.654.715.499	98,46%
Retribusi Jasa Umum	510.148.724.367	515.320.750.809	101,01%
Retribusi Jasa Usaha	7.543.135.000	8.920.934.612	118,27%
Retribusi Perizinan Tertentu	34.482.103.000	19.413.030.078	56,30%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan per 31 Desember Tahun 2024

Permasalahan Dalam Pencapaian Target

1. Terjadi peningkatan yang signifikan pada penerimaan Retribusi daerah terutama pada sektor retribusi Jasa Umum yang semula hanya terealisasi sebesar 41.818.819.441 menjadi 515.320.750.809 atau terjadi peningkatan realisasi sebesar 1.232,27% meskipun demikian kontribusi Retribusi daerah dalam PAD hanya mencapai 20.11% dari 4 Komponen unsur pembentukan PAD.
2. Peningkatan Retribusi dikarenakan banyaknya kode rekening yang sebelumnya berada di Lain-Lain PAD Yang Sah pindah ke Retribusi Jasa Umum.

d. Analisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Tabel 3.28
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

BUMD	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.921.351.298	13.707.743.208	91,87%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1.505.924.153	1.505.924.153	0,00%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	2.767.942.720,00	0	0,00%

BUMD	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
Bagian Laba dari BPR Syariah	3.613.070.978	4.672.657.920	129,33%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	6.352.101.298	6.352.101.298	100,00%
Bagian Laba dari Perseroda Migas	682.312.149	1.177.059.837	172,51%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subsid Pelaporan dan Pembukuan per 31 Desember Tahun 2024

Permasalahan Dalam Pencapaian Target

1. Sampai saat ini belum disampaikan laporan realisasi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota Bekasi.

e. Analisis Lain-Lain PAD Yang Sah

Tabel 3.28
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

LAIN-LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2024		Capaian (%)
	TARGET	REALISASI	
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	300.000.000	1.546.412.800	515,47%
Penerimaan Jasa Giro	15.500.000.000	8.247.949.188	53,21%
Pendapatan Bunga Deposito	24.000.000.000	20.812.683.060	86,72%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	216.403.800	2.360.299.059	1090,69%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	722.720.000	838.443.546	116,01%
Pendapatan dari Pengembalian	32.498.874.183	44.682.675.918	137,49%
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.900.000.000	1.544.690.944	81,30%
Pendapatan Denda Pajak	8.178.676.000	8.392.426.812	102,61%
Pendapatan Denda Retribusi	33.000.000	0	0,00%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	0	704.350.081	0,00%
JUMLAH	83.349.673.983	89.129.931.408	106,93%

Permasalahan Dalam Pencapaian Target

1. Terjadnya penurunan penerimaan dari sektor Jasa Giro dan Bunga Deposito;
2. Pendapatan BLUD tidak lagi tercatat dalam Lain-Lain PAD Yang Sah

f. Arahan Pimpinan

Meningkatkan Pembangunan Daerah membutuhkan anggaran, adanya ketersediaan anggaran yang bersumber dari PAD, Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya meningkatkan penerimaan dari 4 komponen yang membentuk struktur PAD namun Bapenda dalam ruang lingkup tugasnya hanya menjangkau 2 komponen saja itupun untuk komponen retribusi daerah hanya sebagai koordinator saja, praktis yang bisa dioptimalkan oleh Bapenda Kota Bekasi adalah sektor Pajak Daerah.

Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah sesuai dengan kewenangan tugas pada Bapenda Kota Bekasi, namun demikian terjadi dilematis dari meningkatkan pajak daerah maka hal tersebut akan memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu Bapenda Kota Bekasi perlu adanya strategi dalam upaya peningkatan PAD khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Peningkatan cakupan atau intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penerimaan PAD yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi.
- 2) Peningkatan besarnya penetapan.
- 3) Mengurangi tunggakan

Adapun strategi yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan PAD adalah :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
3. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.
4. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.
5. Pembuatan Tim PAD lintas Sektor.

g. Permasalahan, Upaya dan Rekomendasi

Permasalahan :

- 1) PAD menjadi tumpuan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- 2) Penerimaan PAD setiap tahunnya harus meningkat.
- 3) Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah.
- 4) Kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi dipengaruhi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- 5) Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dipengaruhi oleh peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD.
- 6) Peningkatan penerimaan Lain-Lain PAD yang sah dipengaruhi dengan peningkatan peran fungsi kewenangan perangkat daerah dalam pengelolaan urusan di perangkat daerah.
- 7) Peningkatan PAD secara keseluruhan didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang memadai.
- 8) Stabilitas politik dan ekonomi dapat terjaga.

Upaya :

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah, Bapenda Kota Bekasi berupaya mengintervensi pajak daerah melalui :

a. Intervensi Pajak Daerah melalui Regulasi

Yakni Inovasi kebijakan Bapenda Kota Bekasi untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan yang menyesuaikan harmonisasi terhadap keadaan masyarakat. Kebijakan menerbitkan insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok pajak, atau sanksinya. Insentif fiskal yang diberikan atas dasar diskresi Kepala Daerah dengan melihat situasi terkini diharapkan dapat tetap mempertahankan capaian pajak daerah dengan optimal dan dengan tujuan

agar pembiayaan pembangunan daerah tetap stabil.

b. Meningkatkan Fungsi Koordinasi Dengan Instansi Vertika

Melaksanakan Perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Penyelenggaraan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bekasi serta kerjasama penagihan pajak daerah.

c. Intervensi Pajak Daerah melalui verifikasi dan validasi data.

Yakni upaya Bapenda untuk mengetahui transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga dapat menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan, petugas Bapenda melakukan penelitian kantor dengan mengecek harga pasaran di WEB dan kelapangan meneliti kebenaran harga jual.

d. Intervensi Pajak Daerah melalui Penagihan Piutang Pajak Daerah

Melakukan penagihan piutang pajak daerah terhadap mata pajak yang terdapat piutang pajak.

e. Membangun sistem data base pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi

f. Memelihara basis data serta meningkatkan peran data pajak daerah.

g. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Transaksi Real Time (Tapping Box)

Bapenda Kota Bekasi melakukan pemasangan alat terhadap wajib pajak, pemasangan alat tapping box terhadap wajib pajak Hotel, Pajak restoran, pajak hiburan dan pajak Parkir untuk mengetahui potensi pajak real time di lapangan.

h. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemeriksaan Pajak Daerah Bapenda Kota Bekasi melaksanakan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh.

Rekomendasi

- Melanjutkan kebijakan inovasi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Meningkatkan Fungsi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Membuat Inovasi terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
- Mengintegrasikan Sistem Pajak Daerah dengan OPD penghasil

3.5.1.2. Capaian Sasaran Strategis Kedua

Sasaran Kedua : Meningkatnya Nilai AKIP

Indikator Sasaran : Nilai AKIP

Tabel 3.33

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	
1	Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	BB 79	BB 78.07	98,82%

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi

Dari table di atas dapat disampaikan bahwa target kinerja untuk Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi masih belum memenuhi target

a. Arahan Pimpinan

Penyusunan dokumen LKIP dimaksudkan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran kebelakang, untuk itu dalam menyusun LKIP harus dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti :

1. Kepatuhan terhadap peraturan :
Penyusunan LKIP sebaiknya dibuatkan TIM agar sesuai dengan pedoman dan tepat waktu serta bersubtansi
2. Akuntabilitas dan Transparan :
Laporan harus mencerminkan akuntabilitas dan tranfaran serta data yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Kualitas data dan Informasi :
Tim penyusun LKIP Bersama-sama mengolah data dan menganalisa dengan

tepat dan mendalam serta tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi juga kualitatif.

4. Tindak Lanjut dan Evaluasi :

Hasil rekomendasi dari penyusunan LKIP harus ada tindaklanjutnya dan dimonitoring keberlangsungan pelaksanaan hasil dari yang direkomendasikan.

5. Kolaborasi dan Partisipasi :

Tim penyusun harus dapat bekerjasama dengan pihak lain, bahkan pihak luar pemerintah daerah di sekitar agar dapat saling memperbaiki diri.

6. Pemanfaatan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan :

Dokumen LKIP bukan hanya sebagai bahan laporan tahunan akan tetapi sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya.

b. Permasalahan, Upaya dan Rekomendasi

Permasalahan :

- a. Dokumen Perencanaan belum menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja organisasi.
- b. Pengumpulan dan Pengolahan data mekanisme belum terpola dengan baik.
- c. Kinerja AKIP beranggapan hanya tanggungjawab kesekretariatan saja belum menjadi tanggungjawab seluruh Unit Kerja di Bapenda Kota Bekasi.

Upaya :

- Menyusun dokumen perencanaan serta pendukungnya
- Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
- Membuat laporan kinerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyusun perubahan SOP untuk peningkatan pelayanan.

Rekomendasi :

- Mensosialisasi dan asistensi penyusunan indicator kegiatan serta target kinerja di lingkungan Badan;
- Merumuskan mekanisme pengolahan data sesuai kebutuhan;
- Membangun team work di lingkungan Badan;

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

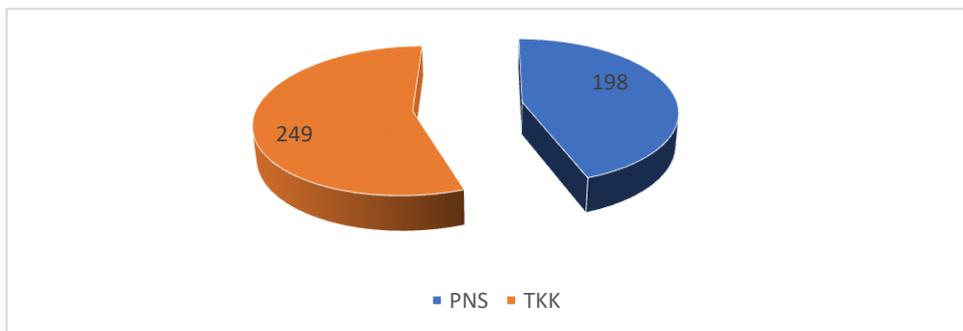
3.6.1 Sumber Daya Manusia

berdasarkan table 1.1 yakni mengenai kepegawaian di Bapenda Kota Bekasi terlihat bahwasanya dengan jumlah sebanyak 447 dengan perbandingan sebagai berikut :

1. Perbandingan PNS dan TKK

Gambar 3.4

Grafik PNS dan TKK



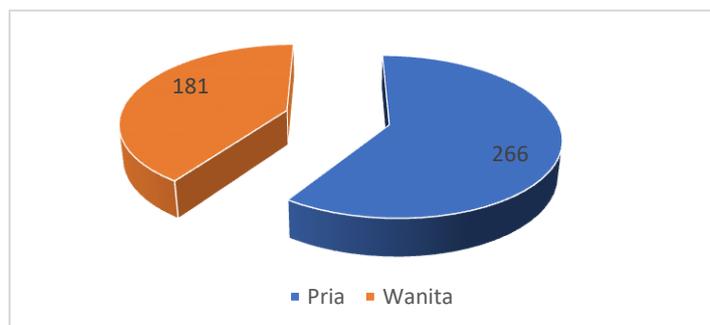
Melihat pada gambar di atas

bahwasanya Bapenda Kota Bekasi masih butuh PNS sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah, hal ini dikarenakan perangkat daerah yang mempunyai bidang urusan sebagai pengelola keuangan dibutuhkan tanggungjawab yang hanya dapat dibebankan kepada PNS

2. Perbandingan Lelaki dan Perempuan

Gambar 3.5

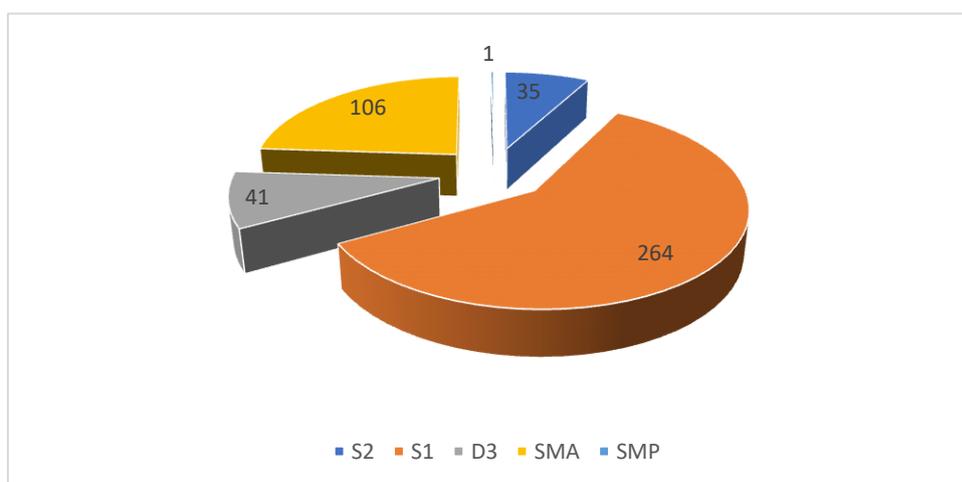
Grafik Pria dan Wanita



Melihat pada gambar di atas bahwasanya Bapenda Kota Bekasi di dominasi oleh Pria yakni 59.51% dan 40.49% wanita, hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pada Bapenda Kota Bekasi dikarenakan perangkat daerah yang mempunyai bidang urusan sebagai pengelola keuangan khususnya tentang pajak dan retribusi daerah membutuhkan kinerja lapangan yang lebih optimal.

3. Analisis Kebutuhan Kompetensi

Gambar 3.5
Grafik Pendidikan Aparatur



Terlihat pada gambar grafik di atas bahwasanya aparatur Bapenda Kota Bekasi didominasi oleh S1 kemudian SMA, D3 dan S2 serta SMP. SDM yang diperlukan oleh Bapenda Kota Bekasi adalah berlatar belakang pendidikan Sarjana, yakni

NO	KEMAMPUAN TEKNIS	EXISTING	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Juru Sita Pajak Daerah	1	16	Untuk di 12 UPTB dan 4 Orang di Bidang Wasdal
2	Juru Nilai Pajak dan Retribusi Daerah	7	16	Untuk di 12 UPTB dan 4 Orang di Bidang Pendapatan
3	Auditor Pajak Daerah	-	36	12 UPTB kali 3 orang
4	Ahli IT	3	5	untuk maintenance
5	Sarjana Ekonomi Akuntansi	-	3	Untuk Pelaporan Pendapatan Daerah

6	Sarjana Perpajakan	-	3	Ahli Perpajakan
7	Sarjana Hukum	-	2	Ahli Hukum Perpajakan
8	Publik Relation/Managemen Tekhnologi dan Informasi	-	5	Humas Pendapatan Daerah

Untuk itu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan pada Bapenda Kota Bekasi melalui kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dapat terealisasi apabila ada kerjasama atau penawaran bimbingan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

3.6.2 Analisis Sarpras

Berdasarkan table 1.2 yakni mengenai sarpras terlihat bahwasanya dengan 23 jenis barang dan jumlah sebanyak 2184 unit dari seluruh jenis barang mengindikasikan bahwasanya Bapenda Kota Bekasi masih membutuhkan kebutuhan barang, adapun analisis kebutuhan sebagai berikut :

NO	URAIAN	EXISTING	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Genset	-	1 Unit	Untuk menjaga jika terjadi listrik padam sehingga pelayanan tetap berjalan
2	Komputer	253	350	Jumlah pegawai di Bapenda yang mencapai hampir 448 orang dan lebih banyak menekankan kepada pelayanan dan pengadministrasian serta pelaporan
3	Printer	311	350	Disesuaikan dengan PC yang ada
4	Printonik	3	15	Untuk kebutuhan Cetak SPPT PBB baik di Badan maupun di UPTD
5	Laptop	8	50	Untuk penagihan dan pemungutan serta mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas (kondisi existing banyak yang sudah tua) Untuk fasilitas sarana di UPTD
6	Kendaraan Roda 2	82	250	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
7	Lemari Arsip	72	300	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
8	Kursi Kerja	384	448	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
9	Meja Kerja	244	448	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi

NO	URAIAN	EXISTING	KEBUTUHAN	KETERANGAN
10	Mesin Tik Elektrik	20	35	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi
11	Kursi Sofa Tunggu	7	35	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi
12	Filling Besi	71	200	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi
13	Televisi	11	35	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi
14	Camera Drone	-	3	Untuk Publikasi dan pendataan potensi
15	Alat Rekam Suara	-	5	Untuk kebutuhan rapat serta peningkatan kompetensi aparatur
16	Laser + switch control	-	5	Untuk presentasi
17	Camera Ruangan	-	3	Untuk Zoom meeting

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.7.1. Analisis Dukungan Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Pertama

1. Capaian Indikator Program Persentase Penerimaan PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan dukungan Kegiatan

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	50.99%	44.96%	79.56%

Penjelasan:

Perhitungan Indikator program pertama yakni membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan keseluruhan pendapatan daerah, adapun untuk realisasi pada Tahun 2024 mencapai 44.96% sehingga tingkat capaiannya adalah 79.56%. Hal ini dikarenakan tidak semua sektor pajak daerah dan retribusi daerah tercapai.

- Penerimaan dari dana transfer mencapai rata-rata penerimaan dari masing-masing sektor mencapai 95%.
- Penerimaan dari sektor PAD mencapai rata-rata penerimaan dari masing-

masing sektor mencapai 90.75%.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang: Meningkatkan peran fungsi intensifikasi pajak daerah dan melaksanakan evaluasi terhadap OPD Penghasil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Evaluasi Capaian Indikator kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian
	● Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	● Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	● Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini untuk melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, Pelaksanaan intensifikasi PAD, Penyusunan Regulasi PAD dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan anggaran pada kegiatan, capaian indikator kegiatan mencapai 100% hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pendapatan daerah dilakukan dengan pengetatan anggaran dan tidak mengurangi substansi penyusunan anggaran pendapatan daerah.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

- Meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan daerah melalui sinkronisasi data potensi dan metodologi penyusunan perencanaan yang profesional.

- Invasi system pelaksanaan pendataan potensi
- Pelaksanaan Reward dan funihment terhadap WP

2. Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah dengan dukungan Kegiatan

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	1.50%	1.17%	17.50%

Penjelasan:

Perhitungan Indikator program yakni jumlah wajib pajak yang terdapat pada NPWPD di Bapenda dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan target 1.50% dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 1.17% hal ini dikarenakan banyaknya secara administrasi WP yang tutup.

- Banyak WP yang tidak membuka usahanya dan secara administrasi telah dilakukan penutupan
- Menurunnya kecenderungan WP BPHTB yang melalukan pelayanan validasi

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

Memberikan arahan kepada UPTD Pajak dan Retribusi daerah untuk lebih berperan aktif dalam melaporkan calon WP Pajak baru.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran 	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 	4 Laporan	4 Laporan	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini adalah untuk pengolahan data PAD, Penetapan Pajak Daerah serta Pelaksanaan sebagai Koordinator Retribusi Daerah. Kegiatan belum bersifat inovatif masih bersifat rutinitas hal ini dikarenakan kebutuhan anggaran yang tinggi Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

- Memapping data potensi disetiap wilayah Kota Bekasi, dan mengintegrasikan dengan system data base potensi pendapatan.
- Melaksanakan penetapan pajak daerah sebagai berdasarkan hasil pendataan dan penilaian sesuai potensi yang ada
- Melaksanakan fungsi koordinasi dengan OPD Penghasil dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah

3. Capaian Indikator Program Persentase Piutang Terbayarkan dengan dukungan Kegiatan

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
----	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------

	Persentase Piutang Terbayarkan	8%	7.03%	87.88%
--	--------------------------------	----	-------	--------

Penjelasan:

Piutang pajak yang dihitung yakni pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB yang tidak termasuk piutang pajak yakni Penerangan Jalan dan BPHTB, adapun realisasinya sampai dengan triwulan IV adalah 7.03%

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Wajib Pajak yang Persuasif
2. Peningkatan Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan
3. Belum terbentuk TIM Penghapusan Piutang

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang: Menginventarisir Wajib Pajak yang tidak patuh dan diklasifikasikan berdasarkan tindakan yang akan dilakukan terhadap WP tersebut yang selanjutnya dibentuk tim dan jadwal seefektif mungkin untuk dapat diproses.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan pajak daerah yakni menindak terhadap WP yang terindikasi tidak patuh

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Kompetensi petugas dalam mengawasi belum sesuai kriteria

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

- Memapping wajib pajak yang terindikasi tidak patuh

4. Capaian Indikator Program Nilai IKM dengan dukungan Kegiatan

No	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian
	Nilai IKM	86.25	86.37	100.14%

Penjelasan:

Perhitungan Indikator program ini adalah untuk mengukur pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah berdasarkan penilaian hasil survey professional.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Bapenda Kota Bekasi dalam hal penanganan pelayanan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

Melaksanakan hasil rekomendasi survey yakni Meningkatkan mutu pelayanan serta mengupgrade aparatur pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana untuk pelayanan.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan Sub Kegiatan sesuai Perjanjian**Kinerja**

No	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian
	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	9 Unit	100%

	• Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
	• Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Kali	2 Kali	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini adalah pelaksanaan Pelayanan terhadap masyarakat, penyusunan pelaporan penerimaan pendapatan daerah dan pemeliharaan system serta upgrade system

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Melaksanakan rekon penerimaan baik terhadap OPD Penghasil maupun Bank Persepsi secara berkala
- Melaksanakan hasil rekomendasi survey IKM
- Melakukan sinergitas system dengan OPD Penghasil

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

Optimalisasi fungsi pelaporan dan pembukuan melalui rekon penerimaan baik dengan bank persepsi maupun OPD Penghasil serta koneksi system dengan OPD Penghasil

3.7.2. Analisis Dukungan Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Kedua

1. Capaian Indikator Program Nilai IKM dengan dukungan Kegiatan

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	Nilai AKIP	BB (79)	BB (78.07)	98.82%

Penjelasan:

Perhitungan Indikator program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dapat mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Profesional dan Akuntabel .

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Penilaian AKIP tidak hanya menjadi tanggung jawab kesekretariatan akan tetapi seluruh unit kerja dilingkungan Bapenda
- Keberhasilan AKIP didukung dengan keberhasilan pencapaian kinerja

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

Melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
5	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%

Penjelasan:

Perhitungan Indikator program ini adalah untuk mendukung nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi juga untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Adanya refocusing anggaran
- Peningkatan Jumlah Pegawai tidak dibarengi dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Sarana dan Prasana masih kurang memadai

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Tahun Akan Datang:

Mengoptimalkan fungsi pengelolaan tata usaha di lingkungan Badan guna tercapainya tujuan dan sasaran Badan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda selama tahun anggaran 2024.

Bapenda Kota Bekasi telah berupaya untuk melaksanakan **OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH** berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator tujuannya adalah Persentase Peningkatan Penerimaan PAD target kinerjanya sebesar 0.01%, dan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Nilai AKIP

1. Capaian tujuan yakni Penerimaan PAD tahun 2024 dengan target sebesar 0.01% tidak mencapai target terealisasi sebesar -1.77% capaian ini merupakan kategori “BAIK”.
2. Capaian Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikatornya adalah Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan targetnya 4,59% terealisasi sebesar 17,42%
3. Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi, ditargetkan sebesar 79 terealisasi sebesar 78,07 dengan Predikat BB.

4.2. Rekomendasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keinginan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dan pelayanan prima Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota

Bekasi Tahun 2024 – 2026 dapat terlaksana.

Strategi yang telah dan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaiankinerja, adalah:

1. Membangun basis data tentang pajak dan retribusi daerah;
2. Menyusun Metodologi perencanaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengansistem data;
3. Menginventarisir kebutuhan regulasi dalam pengelolaan pajak; dan retribusi daerah untuk direview sesuai dengan kondisi saat ini;
4. Melaksanakan intervensi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
5. Menyusun kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan, checker dan on the spot;
7. Melakukan penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Membentuk Tim Sinergitas dengan OPD terkait guna Peningkatan Pendapatan Daerah;
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib pajak/wajib retribusi daerah;
10. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan mendekatkan pelayanan di kecamatan-kecamatan dan Mall Pelayanan Publik (Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame dan Retribusi) dan menambah tempat pembayaran pajak dan retribusi daerah;
11. Melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak PBB- P2;
12. Melaksanakan kegiatan on day service dalam rangka percepatan proses perizinan dan pembayaran;
13. Melakukan riview/penyempurnaan regulasi dan SOP pemungutan Pajak danRetribusi daerah;
14. Melaksanakan pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah;
16. Melaksanakan evaluasi penerimaan PAD secara berjenjang dan berkala.

Untuk program dan kegiatan, Bapenda akan memfokuskan pelaksanaan dimasa yang akan datang terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar dapat mewujudkan sasaran strategis pada Bapenda Kota Bekasi guna terwujudnya RPD 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya:

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan pajak dan retribusidaerah;
2. Meningkatkan fungsi Sitem/IT untuk memudahkan pengelolaan, pembayaran dan pelayanan serta pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan regulasi, sistem dan prosedur yang dapat menguatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Mengupdate data wajib pajak untuk meningkatkan potensi;
5. Memverifikasi piutang pajak daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga LKIP yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan guna kegiatan yang akan datang, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Guna Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Aamiin.....!